GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 188.44/Kep.88-Huk/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 188.44/Kep.343-Huk/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2023

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur dan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.343-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Proovinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.343-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.39-Huk/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.343-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023;
2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021 perihal Implementasi Sistem Regulasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.343-Huk/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.39-Huk/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.44/Kep.343-Huk/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023, ditambah 20 (dua puluh) angka, yakni angka 98 sampai dengan angka 117 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 April 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 188.44/Kep.88-Huk/2023
Tanggal : 3 April 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2023

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
98.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Bnaten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Maret	kebutuhan untuk melaksanakan program Pemerintah Provinsi Banten
99.	Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	April	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
100.	Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
101.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lIngkungan Pemerintah Provinsi Banten	BKD	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Mei	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
102.	Pencabutan atas peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangnan Untuk Kepentingan Umum dan pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Provinsi Banten	PRKP	Peraturan pemerintah 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepntingan Umum	April	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
103.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
104.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
105.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah	Juni	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
106.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
107.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
108.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
109.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
110.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
111.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
112.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
113.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
114.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
115.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
116.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DASAR HUKUM	TARGET PENETAPAN	KETERANGAN
117.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	September	perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR